

Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19

Accountability of The BLT-Village Fund Management During The Covid-19 Pandemic

Heri Sutanto¹ Pancawati Hardiningsih²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 13 February 2021

Revised 19 Mei 2021

Publish 30 June 2021

Keywords:

Accessibility, accountability, Covid-19, village fund management

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>

ABSTRACT

The government issues BLT-Dana Desa to help the poor in village affected by Covid-19. Accountability is needed as a form of responsibility of the village government in managing the funds. The aim of this study is to analyze the effects of the responsibility report presentation and accessibility on the accountability of the BLT-Dana Desa management. The data used in the research is primary data using a questionnaire. The number of samples used are 50 village heads. The data analysis techniques used is multiple linear regression analysis. The result of this research shows that responsibility report presentation and accessibility have positive and significant effects on the accountability of the BLT- village fund management.

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan BLT-Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin di desa terdampak Covid-19. Akuntabilitas dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 Kepala Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Banyaknya kasus positif Covid-19 telah mengakibatkan keresahan mendalam yang dialami seluruh rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak buruk yang hampir dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari adanya Pandemi Covid-19 ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami efek buruk atau penurunan yang signifikan, salah satunya yaitu dampak ekonomi dan sosial. Wabah ini diperkirakan telah menambah banyaknya penduduk dan keluarga miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan September 2020 tercatat penduduk miskin Indonesia sebanyak 27,55 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2019 yang lalu yaitu mengalami kenaikan sebesar 2,76 juta jiwa (BPS Indonesia, 2020). Mereka kehilangan mata pencaharian karena pembatasan kegiatan ekonomi secara besar-besaran dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun.

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

*Corresponding author: herisutanto101@gmail.com

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa.

Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin mendesak membuat penyaluran BLT-Dana Desa hendaknya dilakukan dengan secepat mungkin, serta sasaran yang dicapai terpenuhi dengan baik. Penggunaan sumber data yang secepat dapat dipertanggungjawabkan dan benar harus diperhatikan guna menghindari kesalahan pencatatan penerima bantuan. Pemerintah desa memerlukan tindakan yang siap dan tegas supaya BLT-Dana Desa cepat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Adapun langkah yang harus diperhatikan yaitu penyaluran yang tetap menjaga ketertiban dan menjunjung nilai-nilai keadilan, ketepatan dalam sasaran calon penerima bantuan, ketepatan waktu pemrosesan, dan ketepatan dalam penyampaian laporan administrasi.

Akuntabilitas dibutuhkan untuk mengelola program BLT-Dana Desa yang baik. Akuntabilitas adalah rangkaian wujud dari adanya suatu keharusan guna memperoleh tanggungjawab yang baik atas kesuksesan maupun keterpurukan dari adanya kegiatan suatu organisasi dalam mengejar hasil akhir dari rancangan yang sudah ditetapkan secara teratur dan berkelanjutan (Mustofa, 2012). Kemampuan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan besarnya nilai bantuan dan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa akan mudah tercapai apabila penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan dengan lengkap. Aparat desa dituntut untuk bisa menyusun suatu laporan pertanggungjawaban yang baik, mudah dipahami, dan berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pencairan BLT-Dana Desa ditahap selanjutnya bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan diwaktu yang tepat.

Kemajuan teknologi yang semakin meningkat bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai hal, termasuk bagaimana pengelolaan BLT-Dana Desa yang telah dilaksanakan. Kemudahan aksesibilitas adalah tindakan pokok yang harus ada secara bersamaan dan beriringan dengan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Para pengguna laporan berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan fasilitas yang memadai yang diberikan oleh pemerintah desa. Aksesibilitas adalah suatu rangkaian dimana laporan keuangan yang dihasilkan akan diungkapkan kepada masyarakat luas dan para pengguna laporan keuangan. Aksesibilitas dari laporan keuangan yang mudah dan fasilitas yang memadai pasti bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan hubungan dengan pemerintah akan semakin membaik (Mustofa, 2012). Pentingnya penerapan akuntabilitas yang baik dan benar sangat menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan BLT-Dana Desa. Masyarakat berharap pemerintah desa memberikan akses yang mudah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban melalui papan informasi desa maupun *website* desa.

Kemudahan akses yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat sudah maksimal, terbukti dari tersedianya website khusus untuk data perkembangan Covid-19 di Jawa Tengah melalui saluran <https://corona.jatengprov.go.id>. Masyarakat juga bisa mengakses terkait angka kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah melalui *website* khusus yaitu <https://jateng.bps.go.id>. Fenomena yang terjadi pada kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 berdasarkan data dari Kabupaten Wonosobo dalam angka 2019 masih terdapat 131 ribu jiwa warga miskin. Adanya wabah Covid-19 dikhawatirkan akan bertambahnya angka kemiskinan semakin meningkat dan menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaan karena pembatasan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Angka kemiskinan yang sudah menurun sebelum adanya pandemi ini mengalami kenaikan lagi sebesar 17,36 % berdasarkan data pada (Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2020, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menambah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 1. Penyebaran Kasus Positif Covid-19 Jawa Tengah per November 2020

No	Kabupaten/Kota	Terkonfirmasi	Sembuh	Meninggal
1	Kota Semarang	7.390	6.196	736
2	Kudus	2.271	1.836	252
3	Jepara	2.205	1.850	147
4	Demak	2.028	1.619	275
5	Wonosobo	1.918	1.538	72
6	Kendal	1.906	1.530	78

Sumber : <https://corona.jatengprov.go.id/>

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa banyaknya kasus positif di Kabupaten Wonosobo, angka terus bertambah dan menimbulkan keresahan masyarakat. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang menurun sebesar 17,36 % yang ada pada data Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2020 dan banyaknya kasus konfirmasi positif di Kabupaten Wonosobo dalam *website* <https://corona.jatengprov.go.id/>, tentu jumlah BLT-Dana Desa yang di keluarkan untuk membantu masyarakat miskin di desa tidaklah sedikit. Akuntabilitas pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa untuk mengelola BLT-Dana Desa menjadi faktor penting dalam terwujudnya tepat sasaran dalam penyaluran dana yang sudah ditetapkan, dari hasil analisa dan penelusuran data maka tujuan penelitian ini adalah menguji akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.

2. TELAAH LITERATUR

Stewardship theory merupakan suatu kondisi dimana manajemen tidak mendorong untuk kepentingan pribadi melainkan bertujuan untuk lebih mengelola kepentingan bersama yaitu organisasi yang berintegritas tinggi. Teori ini menjadikan peran yang kuat antara kepuasan dan tercapainya tujuan dalam organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Keberhasilan suatu organisasi akan dicapai apabila pihak manajemen memaksimalkan peran daripada masyarakat dan manajemen secara bersama-sama. Pendekatan teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan amanah kepada pemerintah desa untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Aparat desa bertanggung jawab dan memberikan akses yang mudah dan cepat, sehingga dana dari pemerintah dapat dipercayakan. Hal ini dilakukan supaya kegiatan ekonomi yang ada pada masyarakat dapat tercapai secara maksimal dan meningkatkan kesejahteraan yang merata, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang rawan dengan kemiskinan.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalisir dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia. Pengertian dari dana desa menurut pemerintah yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (2014) merupakan dana yang berasal dari resapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan kepada tiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setempat yang bertujuan sebagai penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) menyatakan bahwa mereka para calon penerima BLT-Dana Desa merupakan masyarakat miskin dan kurang mampu yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang belum terdaftar (*exclusion error*) dengan yang terdapat berbagai macam kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memperoleh berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja.
2. Sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mata pencaharian pokok (tidak mempunyai pengganti ekonomi yang memadai guna terus bertahan dalam kondisi apapun dalam kurun waktu tiga bulan kedepan).
3. Terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit menahun/kronis.

Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas adalah peran dari adanya tindakan pokok yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu kesuksesan dalam mengelola kegiatan organisasi berharap sasaran yang dituju sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsep yang dijadikan sebagai acuan pihak luar akan ditetapkan sebagai ketepatan organisasi dalam mengelola secara bersama-sama merupakan prinsip dari akuntabilitas (Widagdo et al., 2016). Akuntabilitas adalah sebuah kajian dengan kategori lebih mendalam daripada manajemen. Pernyataan ini berdasarkan pada kasus dimana pengelolaan kegiatan yang ekonomis dan efektif tanpa harus memikul beban kewajiban pelaporan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab manajer kepada pihak yang memberikan tanggung jawab (Mardiasmo, 2002). Menurut Sande (2013) akuntabilitas merupakan salah satu bentuk sistem pertanggungjawaban dalam mengolah bermacam-macam sumber daya dan kondisi organisasi yang dipercayakan untuk melaksanakan kebijakan yang secara rutin dalam mencapai tujuan. Penyampaian laporan tanggung jawab merupakan salah satu bentuk kewajiban dari akuntabilitas dimana tindakan tersebut dilakukan oleh seorang ketua dari organisasi kepada para pengguna laporan yang membutuhkan

tentang kondisi keuangan yang dikelola.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemerataan kesejahteraan merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa dalam mencapai akuntabilitas yang maksimal oleh pemerintahan desa itu sendiri. Pengelolaan alokasi dana desa yang baik mencakup bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masalah keuangan dalam anggaran desa yang telah ditetapkan (Astuty & Fanida, 2011). Menurut Poae & Saerang (2013) akuntabilitas yang baik dalam mengelola keuangan daerah yaitu berupa menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan bebas dari kesalahan. Laporan keuangan yang tepat hendaknya dibuat melalui peraturan yang sudah ditetapkan dan berbagai persyaratan dalam penyusunan telah terpenuhi serta bisa diterima oleh pengguna laporan. Apabila tindakan tersebut dapat dilakukan, maka akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah akan tercapai dengan maksimal.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bentuk suatu laporan keuangan yang disajikan memenuhi karakteristik unsur-unsur yang digunakan dalam membuat laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta mudah dipahami oleh pengguna laporan. Menurut Mardiasmo (2006) keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat merupakan salah satu kunci pokok dalam menyusun laporan keuangan yang akan menimbulkan transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus meningkat apabila laporan keuangan yang disajikan terus membaik dan mudah untuk dipahami oleh pengguna laporan. Pengguna laporan berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan cepat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas yang baik dan maksimal yaitu terjadi ketika penyajian laporan keuangan yang ditampilkan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan dan dijadikan acuan pembuatan secara umum serta diikuti dengan kemudahan dalam mengakses dan cepat bagi para pengguna suatu laporan keuangan (Lewier & Kurniawan, 2012).

Pemerintah daerah merupakan salah satu lembaga sektor publik dimana untuk menunjang kredibilitasnya yaitu dengan cara menerapkan aksesibilitas yang mudah dan terbuka. Menurut Apriliani et al., (2015) besarnya para pengguna kepentingan dalam laporan keuangan akan menunjukkan seberapa baiknya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas kepada para pengguna laporan. Tingkat partisipasi stakeholder dalam mendapatkan atau memperoleh laporan keuangan daerah dapat dilihat dengan cara memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para *stakeholder* (Mustofa, 2012). Menurut Lewier & Kurniawan (2012) pengguna laporan keuangan daerah harus difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan akses semudah mungkin. Pengguna laporan keuangan daerah bukan hanya lembaga legislatif yaitu dalam konteks ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan masyarakat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi negara juga harus diberi fasilitas akses yang mudah oleh lembaga pemerintah daerah. Berbagai macam bentuk informasi yang terdapat pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah dalam bentuk data atau informasi terbuka yang bisa dilihat dan mudah dipahami sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Semakin lengkap laporan keuangan daerah yang disajikan, waktu penyelesaian yang tepat, aktifitas keuangan periode sebelumnya dapat dilihat pada informasi laporan keuangan. Penyusunan anggaran untuk periode selanjutnya dapat diukur dengan cara menilai transaksi keuangan yang ada pada laporan keuangan daerah, isi dari laporan keuangan daerah harus jelas dan mudah dipahami agar pengguna laporan tidak kesulitan dalam memahami kandungan dalam laporan keuangan, sehingga akan diperoleh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang akan terus mengalami peningkatan (Lewier & Kurniawan, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012), Lewier & Kurniawan (2012), dan Aliyah & Nahar (2012) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penyajian laporan pertanggung jawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa

Media massa menjadi fasilitas atau sarana dalam mempublikasikan laporan keuangan daerah dengan terbuka, sehingga kandungan informasi-informasi yang terkandung pada suatu laporan keuangan daerah bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat selaku pengguna laporan. Internet (*website*) sebagai sarana

publikasi laporan keuangan akan lebih untuk mempercepat dan mempermudah pengguna laporan dalam mendapatkan laporan keuangan daerah. Menjadikan pengguna laporan keuangan akan semakin jelas dan mengerti pentingnya kemudahan dalam mendapatkan laporan keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwasanya semakin meningkatnya akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah (Lewier & Kurniawan, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi (2012), Apriliani et al., (2015), Lewier & Kurniawan (2012), dan Aliyah & Nahar (2012) menemukan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis data yang diterapkan selama proses penelitian dikarenakan tujuan utama suatu penelitian yaitu guna membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis, yang telah ditetapkan dengan menerapkan dari instrumen penelitian (Sugiyono, 2004). Data primer dijadikan sebagai sumber data utama penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang diserahkan terhadap seluruh responden secara langsung. Penyebaran lembar kuesioner penelitian ini dibagikan secara merata kepada para Kepala Desa yang berada di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data jumlah penduduk pada pemerintah daerah Wonosobo menyatakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo yaitu sebanyak 131 ribu jiwa, dan jumlah kasus yang konfirmasi positif sampai dengan November 2020 yaitu sebanyak 1.918 orang. Teknik Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengajukan berbagai macam bentuk pertanyaan yang dilakukan secara tertulis kepada responden dan dijawab dengan skala angka. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa yang berada di Kabupaten Wonosobo. Unit analisisnya adalah desa sebanyak 58 desa. Adapun sampel terpilih dengan teknik *convenience sampling*, teknik ini digunakan ketika seseorang yang dengan setuju memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti bilamana informasi tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. Jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 50 Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo, dikarenakan beberapa Kepala Desa pada saat yang bersamaan terdapat kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga menjadikan beberapa kuesioner tidak dapat diperoleh kembali.

Selain itu, operasional pengukuran variabel penelitian ini meliputi:

1. Variabel akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban publik dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan. Instrumen variabel akuntabilitas terdiri enam pertanyaan yang dikembangkan dari Dewi & Mildawati (2016) dengan memodifikasi beberapa pertanyaan serta disesuaikan dengan topik penelitian ini. Pengukuran menggunakan tujuh peringkat skala ordinal.
2. Variabel penyajian laporan pertanggungjawaban adalah laporan tertulis mengenai penjelasan lengkap pelaksanaan sebuah kegiatan dari organisasi. Instrumen variabel penyajian laporan pertanggungjawaban terdiri tujuh pertanyaan yang dikembangkan dari Dewi & Mildawati (2016) dengan memodifikasi beberapa pertanyaan serta disesuaikan dengan topik penelitian ini. Pengukuran menggunakan tujuh peringkat skala ordinal.
3. Variabel aksesibilitas adalah kemampuan untuk memberikan akses atau memperoleh laporan pertanggungjawaban. Instrumen variabel aksesibilitas terdiri lima pertanyaan yang dikembangkan dari Dewi & Mildawati (2016) dengan memodifikasi beberapa pertanyaan serta disesuaikan dengan topik penelitian ini. Pengukuran menggunakan tujuh peringkat skala ordinal.

Validitas adalah suatu tindakan yang menggambarkan bentuk kesalihan suatu tes. Instrument dalam validitas didapatkan dari mengkorelasikan antara nilai yang didapat oleh masing-masing *point* pertanyaan atau pernyataan dengan total yang didapat (Sanusi 2016). Suatu item dinyatakan valid bilamana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bilamana item dinyatakan tidak valid yaitu $r_{hitung} < r_{tabel}$ (Ghozali 2012). Uji reliabilitas yaitu suatu alat uji data yang menggambarkan sampai seberapa jauh mana alat pengukur bisa dapat diandalkan. Apabila dilakukan pengujian atau pengukuran selama dua kali dan menunjukkan perolehan hasil yang sama dengan penggunaan alat ukur yang sama maka data tersebut dinyatakan konsisten (Sugiyono 2017). Menurut Sekaran (2011), pengujian yang baik apabila nilai koefisien yang didapat dalam kisaran 0,70 atau mendekati angka 1,0.

Penggunaan uji normalitas yaitu untuk menyatakan apabila data yang sudah didapatkan terdistribusi

dengan normal atau tidak normal. Data dinyatakan normal apabila distribusi terhadap nilai pada variabel memiliki sebaran normal. Alat uji normalitas data bisa diperoleh dengan melakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Bilamana nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 dengan demikian data yang tersebut berdistribusi dan menyebar dengan normal (Irianto 2004). Selain itu, maksud dari uji Multikolinearitas menurut Ghozali (2011) yaitu pengujian yang memiliki tujuan untuk menilai model regresi yang ada pada variabel independen. Cara mencari dari ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilakukan uji menggunakan nilai *tolerance value* maupun kebalikannya yaitu *variance inflation factor* (VIF).

Poin selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Maksud dari pengujian heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk menganalisis sejauh mana model pada regresi terdapat variasi yang tidak sama terhadap residual sebuah pengamatan kepada pengamatan lainnya yang sesuai (Ghozali, 2011). Selain itu, Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi merupakan penjelasan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan cakupannya terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2011) analisis regresi merupakan bentuk alat uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana angka ketergantungan variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel independen. Tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara penyajian laporan pertanggungjawaban (X1) dan aksesibilitas (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 (Y), dilakukan dengan pengujian regresi berganda. Model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$AKT = a + b_1PLPJ + b_2AKS + e$$

Keterangan :

- AKT : akuntabilitas
- PLPJ : penyajian laporan pertanggungjawaban
- AKS : aksesibilitas
- a : variabel/bilangan konstan
- b_1b_2 : koefisien regresi
- e : variabel pengganggu dalam penelitian

Uji statistik *t* merupakan pengujian yang mempunyai tujuan sebagai bentuk menggambarkan seberapa besarnya pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2012).

1. Bilamana nilai signifikansi uji $t < \alpha = 0,05$ maknanya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel variabel dependen dan hipotesis diterima.
2. Sebaliknya bilamana nilai signifikansi uji $t > \alpha = 0,05$ maknanya tidak terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis ditolak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Validitas adalah suatu tindakan yang menggambarkan bentuk kesalihan suatu tes. Instrument dalam validitas didapatkan dari mengkorelasikan antara nilai yang didapat oleh masing-masing *point* pertanyaan atau pernyataan dengan total yang didapat (Sanusi 2016). Hasil uji validitas penelitian dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 berikut:

Tabel 2. Uji Validitas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	PLPJ1	0,878	0,279	Valid
2	PLPJ2	0,894	0,279	Valid
3	PLPJ3	0,849	0,279	Valid
4	PLPJ4	0,909	0,279	Valid
5	PLPJ5	0,872	0,279	Valid
6	PLPJ6	0,900	0,279	Valid
7	PLPJ7	0,855	0,279	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3. Uji Validitas Aksesibilitas

No	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	AKS1	0,748	0,279	Valid
2	AKS2	0,871	0,279	Valid
3	AKS3	0,803	0,279	Valid
4	AKS4	0,864	0,279	Valid

5	AKS5	0,751	0,279	Valid
---	------	-------	-------	-------

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4. Uji Validitas Akuntabilitas

No	Pertanyaan	rhitung	rtabel	Keterangan
1	AKT1	0,393	0,279	Valid
2	AKT2	0,468	0,279	Valid
3	AKT3	0,552	0,279	Valid
4	AKT4	0,885	0,279	Valid
5	AKT5	0,912	0,279	Valid
6	AKT6	0,604	0,279	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian validitas yang diperoleh dari tabel 2, 3 dan 4 diatas, menjelaskan bahwasanya variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan akuntabilitas memperlihatkan r_{hitung} niainya lebih besar dari 0,279. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik bahwa variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan akuntabilitas telah memenuhi persyaratan validitas. Selain itu, uji reliabilitas merupakan pengujian yang menggambarkan sampai sejauh alat pengukur bisa dapat diandalkan. Apabila dilakukan pengujian atau pengukuran selama dua kali dan menunjukkan perolehan hasil yang sama dengan penggunaan alat ukur yang sama maka data tersebut dinyatakan konsisten (Sugiyono 2017).

Tabel 5. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Chronbachs Alpha	Keterangan
1	Penyajian LPJ	0,950	Reliabel
2	Aksesibilitas	0,864	Reliabel
3	Akuntabilitas	0,721	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengujian reliabilitas dapat dinyatakan bahwasanya penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan akuntabilitas memperoleh nilai *Chronbachs Alpha* diatas 0,7. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik bahwa variabel yang digunakan reliabel, maka dari itu sebaran kuesioner bisa diteruskan untuk pengolahan data selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada uji normalitas yaitu bilamana nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 maka dari itu data yang diperoleh berdistribusi dan menyebar dengan normal (Irianto, 2004).

Tabel 6. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,712180002
Most Extreme Differences	Absolute	0,080
	Positive	0,060
	Negative	-0,080
Test Statistic		0,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil yang didapatkan pada tabel 6 menyatakan bahwasanya keseluruhan data pada variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan akuntabilitas mengalami gejala berdistribusi normal. Perolehan pernyataan tersebut diketahui dari nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, sehingga perolehan hasil yang ditarik dalam uji normalitas diatas data berdistribusi normal dan berbagai syarat telah terpenuhi dengan baik. Selain itu, uji multikolinearitas menurut Ghozali (2011) yaitu pengujian yang memiliki tujuan untuk menilai model regresi yang ada pada variabel independen.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	TOL
Penyajian LPJ	1,386	0,721

Aksesibilitas	1,386	0,721
---------------	-------	-------

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil yang didapatkan melalui pengujian multikolinearitas menyatakan keseluruhan jumlah TOL pada kedua variabel lebih dari 0,10 dan angka pada VIF kurang dari 10, sehingga kesimpulan yang diambil yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selain itu, uji heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk menganalisis sejauh mana model pada regresi terdapat variasi yang tidak sama terhadap residual sebuah pengamatan kepada pengamatan lainnya yang sesuai (Ghozali, 2011).

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Penyajian LPJ	0,421
Aksesibilitas	0,076

Sumber: Data diolah, 2020

Meninjau pada hasil pengujian heteroskedastisitas menyatakan keseluruhan jumlah signifikansinya pada kedua variabel lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang bias diambil yaitu tidak terdapat/mengalami gejala heteroskedastisitas pada variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas. Selain itu, menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi merupakan penjelasan sejauh mana cakupan pada variabel dependen dapat dengan mudah dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,771	0,595	0,578	1,74823

Sumber: Data diolah, 2020

Meninjau pada hasil pengujian R^2 pada tabel 9 menyatakan bahwasanya porsi kedua variabel independen yaitu penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas guna memberikan penjelasan pada variabel dependen yaitu akuntabilitas sebanyak 57,8%, sisanya ($100\% - 57,8\% = 42,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak mampu untuk diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, menurut Ghozali (2011) Analisis regresi merupakan bentuk alat pengujian data yang digunakan untuk memperoleh hasil sampai sejauh mana angka ketergantungan variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel independen.

Tabel 10. Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	9,586	1,872		5,120	0,000
Penyajian LPJ	0,223	0,066	0,368	3,366	0,002
Aksesibilitas	0,422	0,90	0,511	4,678	0,000

Sumber: Data diolah, 2020

Meninjau pada hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwasanya perolehan nilai koefisien regresi variabel penyajian laporan pertanggungjawaban menyatakan positif sebanyak 0,223. Hal tersebut menggambarkan apabila penyajian laporan pertanggungjawaban dinaikkan satu satuan dengan asumsi variabel aksesibilitas dinyatakan konstan, maka peningkatan terhadap nilai akuntabilitas sebanyak 0,223. Koefisien regresi variabel aksesibilitas menyatakan positif sebanyak 0,422. Hal tersebut menyatakan bahwa aksesibilitas ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dinyatakan konstan, dengan demikian hasil peningkatan terhadap nilai akuntabilitas sebanyak 0,422.

Meninjau pada hasil pengujian regresi linear berganda dinyatakan bahwasanya variabel penyajian laporan pertanggungjawaban didapatkan nilai t_{hitung} yaitu sebanyak 3,366 dan angka signifikansi sebanyak 0,002, apabila dibandingkan dengan t_{tabel} (1,678) maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga hasil yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik adalah H_1 diterima, maknanya terdapat pengaruh yang positif antara penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Selain itu, variabel aksesibilitas didapatkan nilai t_{hitung} sebanyak 4,678 dan angka signifikansi sebanyak 0,000, apabila dibandingkan dengan t_{tabel} (1,678) maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan signifikansinya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa H_2 diterima, maknanya aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

Variabel penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengel-

olaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Temuan ini mendukung penelitian Mustofa (2012); Lewier & Kurniawan (2012); dan Aliyah & Nahar (2012) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Temuan ini mendukung *Stewardship theory* dimana pemerintah desa menyajikan laporan pertanggungjawaban dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik. Laporan pertanggungjawaban pengalokasian dana bersifat relevan, mudah untuk dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2005) yang telah ditetapkan.

Variabel aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Temuan ini mendukung penelitian Sukhemi (2012); Apriliani et al., (2015); Lewier & Kurniawan (2012); dan Aliyah & Nahar (2012) bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Temuan ini mendukung *Stewardship theory* dimana pemerintah desa terus memfasilitasi dalam kemudahan akses kepada warga masyarakat mengenai pelaksanaan dan alokasi BLT-Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Kesimpulan yang didapat maka sama dengan kandungan yang ada pada SIKD yaitu data yang terbuka dan dapat diakses oleh pengguna laporan.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Meninjau dari hasil diskusi pembahasan dan rujukan teori sehingga kesimpulan yang diperoleh bahwasanya penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Model yang terdapat pada penelitian ini tergolong masih sangat sederhana sehingga kedepan dapat diteliti dengan pengembangan lebih lanjut dan metode yang lebih luas serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Kepala desa harus lebih cermat dan tanggap pada penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, perangkat desa harus selalu rutin memperbarui data calon penerima BLT-Dana Desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat serta mengumumkan calon penerima BLT-Dana pada papan informasi desa maupun melalui internet. Penelitian kedepan diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel penelitian, seperti transparansi laporan, monitoring dan evaluasi penyaluran BLT-Dana Desa. Peneliti selanjutnya perlu mengembangkan pada wilayah kabupaten yang lain dengan kondisi yang sama untuk dilakukan analisis komparasi kinerja akuntabilitas terkait dengan BLT-Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. 8(2), 137–150 <https://doi.org/10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35>.
- Apriliani, N. K. A., Sujaya, E., & Yuniarta, G. A. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik, Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)*. 3(1) <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5162>.
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2011). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*.
- BPS Indonesia. (2020). *Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 07(56)*, 1–12.
- Dewi, A. C., & Mildawati, T. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 449–461.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: Australian Journal of Management*.
- Ghozali. (2011). *Tujuan Uji Normalitas*. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 20 (Edisi keenam)*. Semarang:

- Universitas Diponegoro. Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Irianto, A. (2004). Statistik Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya. In *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- Lewier, C. N., & Kurniawan, H. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. 1–14.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.299>
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 1 (2005). [http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan%20rokok%20bagi%20kesehatan.pdf)
- Permendes No. 06 Tahun 2020. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Poae, D. A., & Saerang, D. P. E. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35>
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, 2013 - Ejournal.Unp.Ac.Id*, 1–20.
- Sanusi. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. In *IOSR Journal of Economics and Finance*.
- Sekaran, U. (2011). Research Methods for Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis). In *Metode Penelitian*.
- Sugiyono. (2004). Metode Peneitian Bisnis. In *Metode Peneitian Bisnis*.
- Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta. In *Jurnal Akuntansi*.
- Sukhemi. (2012). *Pengaruh aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah*. 286–293.
- UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>